

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TESIS**

OLEH

**NURHAYATI HARAHAP  
NPM. 131801051**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan  
Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

**N a m a : Nurhayati Harahap**

**N I M : 131801051**

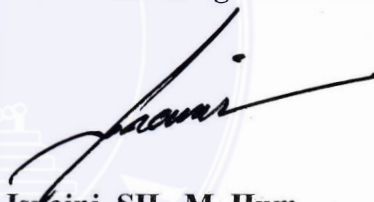
**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M. Si.**

**Pembimbing II**



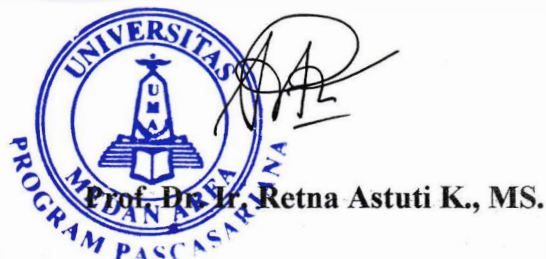
**Isfaini, SH., M. Hum.**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**



**Dr. Warjio, MA.**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS.**

**Telah diuji pada Tanggal 16 Juni 2015**

---

---

**Nama : Nurhayati Harahap**

**NPM : 131801051**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Warjio, MA**

**Sekretaris : Muaz Zul, S. H., M. Hum.**

**Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M. Si.**

**Pembimbing II : Isnaini, SH., M. Hum.**

**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2. Manfaat Praktis .....	9
1.5. Landasan Hukum Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1. Pengertian Korupsi .....	11
2.2. Pengertian Implementasi .....	14
2.3. Pengertian Good Governance .....	18

2.4. Pengertian Etika Publik.....	19
2.5. Pengertian Perilaku Manusia.....	20
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1. Bentuk Metode Penelitian.....	21
3.2. Lokasi Penelitian.....	22
3.3. Sample Sumber Data.....	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5. Teknik Analisa Data.....	26
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, DAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....</b>	<b>27</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	27
4.2. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2014-2018 ...	28
4.3. Hasil Penelitian .....	30
4.3.1. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Pemerintah Daerah Sumatera Utara 2014 .....	30
4.3.2. Jadwal Pelaporan Hasil PPK Tahun 2014.....	35
4.4. Pembahasan.....	37
4.4.1. Implementasi Aksi PPK sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2014 .....	37
4.4.2. Implementasi Aksi-PPK 2014 dan Suasana Kerja Di Pemprovsu.....	45
4.4.3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Aksi-PPK 2014 di Pemprovsu .....	74

4.4.3.1. Faktor Pendukung.....	75
4.4.3.2. Faktor Penghambat.....	76
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	79
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN</b> .....	



**ABSTRAK****IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NO 2 TAHUN 2014 TENTANG  
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

NAMA : NURHAYATI HARAHAP  
NPM : 131801051  
PROGRAM : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PEMBIMBING I : PROF. DR. R. HAMDANI HARAHAP, M. SI.  
PEMBIMBING II : ISNAINI, SH., M. HUM.

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah korupsi yang terjadi di Indonesia dan sudah begitu banyak para koruptor yang dihukum serta kasusnya disebar di media massa, namun orang yang melakukan korupsi terus saja bertambah. Beberapa tahun terakhir ini di lingkungan Pemprovsu begitu banyak para aparat yang terjebak kasus korupsi bahkan sudah ada yang dikenakan hukuman. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diterapkan di Pemprovsu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati langsung, wawancara dan dokumentasi dengan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya pelaksanaan Aksi-PPK 2014 di Pemprovsu masih bersifat administrasi yaitu hanya mengirim data Aksi *via email*. Terdapat masih ada kesenjangan antara hasil Aksi-PPK secara administratif dengan yang ada dilapangan. Sehingga peneliti menarik kesimpulan dan saran bahwa secara administratif, Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2014 berjalan baik, namun dalam prakteknya masih harus dilakukan perubahan pola pikir dan perilaku. Gaung pelaksanaan Aksi-PPK harus diketahui oleh seluruh birokrat di Pemprovsu. Harus ada *reward* dan *punishment* dalam pelaksanaan Aksi-PPK tahun 2015. Adanya komitmen bersama untuk menghilangkan budaya setoran dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai birokrat.

Kata kunci : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pemprovsu.



## ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE INTRUCTION FROM THE PRESIDENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 IN 2014 IS ABOUT  
THE ACTION TO PREVENT AND FIGHT AGAINTS  
THE CORRUPTION IN THE GOVERNMENT  
OF NORTH SUMATERA PROVINCE

NAME : NURHAYATI HARAHAP  
NPM : 131801051  
PROGRAM : MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION  
SUPERVISOR : PROF. DR. R. HAMDANI HARAHAP, M. SI.  
CO SUPERVISOR : ISNAINI, SH., M. HUM

The background of this research the problem of corruption in Indonesia and has so many of the criminals are convicted and the case was disseminated in the media, but continues to grow people who commit corruption. The environment Pemprovsu the last few years so many officials who exposed corruption cases there's even punished. And this attracted the attention of researchers to determine the Implementation of the instruction from Presidential of the Republic of Indonesia number 2 in 2014 is about the Action to prevent and fight against the corruption in the government of North Sumatera Province. Collecting data in this study conducted by researchers with direct observation, interviews and documentation of the qualitative research methods. The research results were obtained that the implementation of the Action PAC 2014 Government in North Sumatera still administrative action that is only send data via email. And still there is a gap between the results of administrative action by the PAC in the field. So the researchers draw conclusions and suggestions that the administrative, the implementation of the Instruction from the President number 2 in 2014 went well, but in practice remains to be done changing patterns of thought and behavior. Echoes of the implementation of the Action PAC should be known by all the bureaucrats in Government in North Sumatera. There should be a reward and punishment in the implementation of the Action PAC in 2015. The existence of a shared commitment to eliminate the culture of the deposit in carrying out its duties and obligations as a bureaucrat.

Key words : the action to prevent and fight againts the corruption ; and the government of North Sumatera Province

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **"IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA"**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Bapak Dr. Warjio, MA.
4. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M. Si. Dan Bapak Isnaini, SH., MHum.
5. Bapak Boris Parlindungan, S. Kom., MSi., Kasubbid Pemerintahan Umum Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud beserta seluruh tim APPK Pemprovsu 2014.
6. Ayah, Ibunda, suami, anak-anak tercinta serta seluruh keluarga.
7. Rekan-rekan mahasiswa Kelas B Program Pascasarjana Magister Admintrasi Publik, Universitas Medan Area angkatan 2013.
8. Seluruh staff/ pegawai di Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Semua pihak yang namanya tidak dapat Peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak berperan membantu Peneliti dalam menyusun tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi

penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Juni 2015

**Nurhayati Harahap**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada 10 (sepuluh) tahun terakhir ini telinga kita sering sekali mendengar kata korupsi, baik dari media elektronik maupun sekedar mendengar percakapan orang diberbagai tempat atau lokasi. Hal ini karena belakangan aparat penegak hukum baik Polri, Kejaksaan, khususnya KPK sangat intens memberantas orang-orang yang dicurigai atau tersangkut dengan masalah korupsi. Korupsi memang perbuatan yang sangat merugikan baik negara, bangsa maupun masyarakat. Maraknya korupsi dan kolusi di Indonesia menyebabkan buruknya kondisi infrastruktur. Selanjutnya kondisi infrastruktur yang buruk menyebabkan tingginya berbagai biaya di Indonesia.

Hal ini dikemukakan pengamat ekonomi Mari Pangestu dan kepala perwakilan Bank Dunia Jakarta Andrew Steer, menjawab peserta diskusi "*CNBC Strategic Forum-Indonesia 2004 : Blueprint For Growth and Investment*", Kamis (10/6) di Jakarta. Seusai acara, kepada pers Mari menjelaskan bahwa :

“...Dengan pertumbuhan ekonomi 3-4%, saat rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 19%. Untuk mencapai pertumbuhan 4-5 % diperlukan ratio investasi terhadap PDB 22-23 %. Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7% (kembali ke kondisi ideal Indonesia sebelum terjadi krisis) diperlukan ratio investasi terhadap PDB sekitar 26%. (*Kompas*, Jumat, 11 Juni 2004)”.

Hal senada juga dikemukakan oleh Karlina Helmanita (2011) :

“...Korupsi tidak diragukan menyebabkan lumpuhnya keuangan atau ekonomi suatu negara. Konsekuensinya, hutang kepada pihak luar negeri baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta semakin menumpuk. Di Indonesia, hutang swasta diambil ahli oleh pemerintah sebagai kewajibannya. Lantas siapa yang akan membayar hutang-hutang tersebut? Tentu saja rakyatlah yang akan membayarnya. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang hutangnya terparah, berpenghasilan rendah (*severely indebted low income country*), dan termasuk dalam katagori negara negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia”.

Perilaku korupsi yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya yang dilakukan para pemangku jabatan sudah melampaui batas. Bagai virus yang menyebar tanpa ada obat yang mampu menghentikan penyebarannya, sehingga terkesan tidak memiliki rasa malu lagi. Hukuman penjara tidak mampu mengurangi rasa ingin orang untuk melakukan korupsi, bahkan menyebarluaskan photo dan beritanya diberbagai massmedia, baik elektronik maupun media cetak tetap saja jumlah orang untuk korupsi tidak berkurang. Padahal bila kita cermati para pelaku korupsi bukanlah orang yang kekurangan harta benda ataupun yang memiliki pendapatan yang standart, tapi adalah para pemangku jabatan yang

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran.*

Arikunto, Suharsimi, 2010 ; ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek***, Jakarta, Rineka Cipta.

Purwanto, Agus dan Erwan, Ph. D., 2012 ; ***Implementasi Kebijakan Publik***, Yogyakarta, Gava Media.

Alatas, S. H., 1987 ; ***Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi***, Jakarta : LP3ES.

Bungin, Burhan, Prof, 2007 ; ***Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya.***

Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dwiyanto, Agus, 2005 ; ***Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik***, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus, dkk, 2003 ; ***Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah***, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta : UGM.

Dwiyanto, Agus, dkk, 2007 ; ***Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia***, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta : UGM.

Denhard, KG, 1988 ; ***The etics of public service, resolving moral dilemmas in the public organization.*** New York : Green wood press, dalam Karjuni Dt. Maani, ***Etika Pelayanan Publik***, Demokrasi Vol IX No 1 Th 2010.

Haryatmoko, 2013 ; ***Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi***, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Indrawijaya, Ibrahim Adam, 1983 ; ***Perilaku Organisasi***, Bandung, Sinar Baru.

Kamil, Sukron, Prof, Dr, 2013 ; ***Modul Pendidikan Integritas dalam Islam***, Tiri Making Integrity Work.

Helmalina, Karlina dan Kamil, Sukron, dkk, 2011 ; ***Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi***, Jakarta , CSRC Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011 ; ***Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.***



- Simanjuntak, Marcella Elwina dan Ginting, Jamin dan Hamid, Abdul Haris dan Litaay, Theofransus L. A. dan HR, Mahmutarom, 2013 ; ***Modul Pendidikan Integritas dalam Perspektif Hukum***, Tiri Making Integrity Work.
- Nugroho, Riant, 2008 ; ***Public Policy***, PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant, 2010 ; ***Public Policy***, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Pramusinto, Agus, Dr, 2011 ; ***Governance Reform di Indonesia, Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional***, Yogyakarta, Gava Media dan MAP-UGM.
- Abidin, Said Zainal, 2012 ; ***Kebijakan Publik Edisi 2***, Salemba Humanika.
- Saryono, 2010 ; ***Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan***, Jogjakarta, Nuka Medika.
- Simanjuntak, Marcella Elwina dan Ginting , Jamin dan Haris, Hamid Adb dan Litaay, Theofransus dan HR, Mahmutarom, 2013 ; ***Modul Pendidikan Integritas dalam perspektif Hukum***, Tiri Making Integrity Work.
- Sugiono, 2010 ; ***Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan RD***, Bandung, Alfabeta.
- Sugiono, 2008 ; ***Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan RD***, Bandung, Alfabeta.
- Wijayanto, Agus dan Zacrie, Ridwan, Editor, 2009 ; ***Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab Akibat, dan Prospek Pemberantasan***, PT. Gramedia Pustaka Utama.

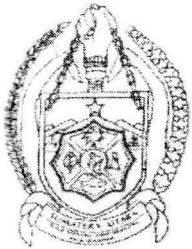
#### Sumber Lainnya :

[acch.kpk.go.id](http://acch.kpk.go.id)

1. [academia.edu/8137597/Psikologi Sosial 1 Perilaku Manusia](http://academia.edu/8137597/Psikologi_Sosial_1_Perilaku_Manusia)
2. [antaranews.com](http://antaranews.com)
3. [bpn.go.id](http://bpn.go.id)
4. [innovation-cc/scholarly](http://innovation-cc/scholarly)
5. [ipjor.oxfordjournals.org](http://ipjor.oxfordjournals.org)
6. [journal.unp.ac.id/index.php](http://journal.unp.ac.id/index.php) (Demokrasi Vol. IX Nomor 1 Tahun 2010, oleh Karjuni Dt. Maani)
7. [journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118](http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118)
8. *kompas, Jumat*
9. [kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang](http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang)



10. *kompas.com*
11. *merdeka.com*, Kamis, 20 April 2014
12. Miles dan Humberman, 1992, diunduh dari [www.academia.edu/4055918/teknik\\_analisa\\_data\\_kualitatif](http://www.academia.edu/4055918/teknik_analisa_data_kualitatif)
13. *Republika Online*
14. Suliyanto, Metodologi Penelitian Teknik Penulisan Proposal, diunggah dari <https://mmunsoed27.files.wordpress.com>
15. Webster dalam Wahab, 2004:64, diunduh dari [www.academia.edu/7149367/implementasi\\_prinsip\\_demokrasi](http://www.academia.edu/7149367/implementasi_prinsip_demokrasi)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 21-A Telp. 4538045, 4571306, Fax. (061) 4513830  
E-mail : [bappeda@sumutprov.go.id](mailto:bappeda@sumutprov.go.id) ; Homepage : <http://www.bappeda.sumutprov.go.id/>  
M E D A N - 20152 PO BOX - 1054

**SURAT KETERANGAN**

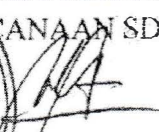
Nomor : 300 / BPPU / 10 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Provinsi Sumatera Utara, menerangkan bahwa :

Nama : Nurhayati Harahap  
NPM : 131801051  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul Tesis : *"Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Studi di Pemprovsumu)"*

Adalah benar telah selesai melaksanakan pengambilan data / penelitian di Pemprovsumu dari tanggal 13 Maret – 22 April 2015.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan berdasarkan Surat Wakil Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area Program Pasca Sarajana Nomor 191 / Wadir.Ak/PPS-UMA/2015 tanggal 14 Pebruari 2015.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABID PERENCANAAN SDM DAN SOSIAL BUDAYA,  
  
\* BAPPEDA \*  
SYAHRIL A. PULUNGAN, M.SI  
PEMADIRA TK. I  
NIP. 19620607 199003 1 003



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## PROGRAM PASCASARJANA

Program Studi : Magister Administrasi Publik - Magister Agribisnis  
Magister Ilmu Hukum - Magister Psikologi

Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp.(061) 8201994, Fax.(061) 8226331 Medan 20120

Nomor : 191 / Wadir.Ak/PPS-UMA/2015  
Lamp. : -  
Hal : Izin Pengambilan Data

14 Pebruari 2015

Yth. Gubernur Prov. Sumatera Utara  
Cq. Plh Sekda Prov. Sumatera Utara  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

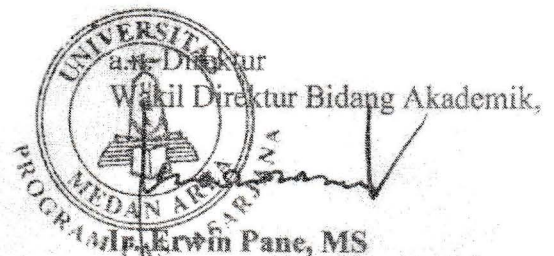
Sehubungan dengan adanya tugas akhir mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Medan Area, kami mohon kesediaan Saudara memberikan izin rekomendasi penelitian kepada mahasiswa tersebut at namanya dibawah ini :

Nama : Nurhayati Harahap  
NPM : 131801051  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul Tesis : *"Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (Studi Di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara)"*

Untuk melaksanakan Pengambilan data di Instansi yang Bapak pimpin sebagai bahan untuk melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Medan Area.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

<b>BAPPERASU</b>	
AGENDA No. :	005 / 519
TGL. TERIMA :	10 Februari 2015
JAM TERIMA :	9.50 Wib.



Tembusan :  
1. Ka. Prodi MAP PPs UMA  
2. Mahasiswa Ybs

<b>SEKDAPROV</b>	
AGNO :	790 D/SEKR
TANGGAL :	18.02.2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA	
TGL TERIMA :	17 - 2 - 2015
CODE :	070 / 1350

## LAMPIRAN ISTILAH – ISTILAH

Aksi-PPK	Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
PEMROVSU	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
UKP-PPP	Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
BANSOS	Bantuan Sosial
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
PIDSUS	Pidana Khusus
RAN-PK	Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi
RAN-PPK	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RENSTRA	Rencana Strategi
TI	<i>Transparansi</i> Internasional
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SEKDAPROVSU	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
DIP	Daftar Informasi Publik
STRANAS PPK	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
BPPT	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah
LRA PPKD	Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
RPD	Rencana Pembangunan Daerah